

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut Nounkeu, sebuah organisasi tentunya memiliki langkah utama dalam merencanakan hal tertentu untuk mencapai tujuan utama, langkah tersebut dinamakan strategi. Sasilo et al mengemukakan bahwa ada tiga strategi secara umum untuk mencapai tujuan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi strategi. Lilleker dan Koc Michalska juga berpendapat bahwa kata lain strategi adalah sebuah perencanaan (planning) dan manajemen (management) guna mencapai sebuah tujuan tertentu. Artinya adalah strategi merupakan langkah prioritas yang diambil oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan utama. Ada tiga tahapan strategi yang umumnya digunakan, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>1</sup>

Kata “memperoleh” merupakan turunan dari kata “peroleh”. Dalam bahasa Indonesia, kata peroleh merupakan bentuk dasar dari kata kerja yang berarti mendapatkan atau memperoleh sesuatu. Kata memperoleh memang tidak spesifik dijelaskan tentang memperoleh, melainkan melalui bahasan lain. Misalnya “memperoleh” dalam kontes Sumber Daya Manusia (SDM) dalam suatu pekerjaan, kata “memperoleh” merujuk pada proses dimana karyawan mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman melalui program pengembangan SDM dalam pekerjaan. Ketika kata “peroleh” diawali dengan “mem-”, kata tersebut menjadi kata kerja yang menunjukkan tindakan untuk melakukan atau mendapatkan sesuatu, seperti “memperoleh pengetahuan” atau “memperoleh keuntungan”. Jadi kata memperoleh merupakan bentuk kata kerja dari “peroleh” yang menggambarkan aksi atau proses memperoleh sesuatu.<sup>2</sup>

Strategi jika diterapkan dalam partai politik, strategi merupakan langkah yang digunakan partai politik untuk memperoleh suara dalam Pemilihan Umum. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

---

<sup>1</sup> Yohanes De Britto Bimo Triwicaksono and Adi Nugroho, “Strategi Komunikasi Politik Pemenangan Kepala Daerah”, *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, Vol. 5, No. 1 (2021): 137.

<sup>2</sup> Hendita Yosepa, Acep Samsudin, and Asep Muhammad Ramdan, “Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Tingkat Etos Kerja Karyawan Pada Hotel Santika Sukabumi”, *Jurnal Ilmu Manajemen Vol. 8*, No. 3 (2020): 742.

juga merupakan partai yang memiliki nama dalam sejarah dikarenakan nam besar Gus Dur. Namun tentunya PKB tidak bisa hanya berpegang atas nama Gus Dur, PKB memiliki strategi untuk tetap mempertahankan namanya untuk memperoleh suara dalam pemilu. Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dalam Pemilu Legislatif 2019 mampu menyumbangkan suara kepada PKB terbesar di Kudus sehingga PKB mampu menduduki posisi kedua setelah Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP).

Namun dalam realita, dalam setiap pemilu legislatif tentunya ditemukan pemilih golput, atau tidak ikut memilih. Yang artinya dalam pemilu, strategi partai politik tentunya memiliki kemungkinan tidak memiliki keberhasilan. Tentu saja tingkat berhasilnya strategi pun harus dilihat dari bagaimana perilaku masyarakat dalam pemilu. PKB merupakan partai dengan kedudukan kedua dalam memperoleh suara terbanyak dalam Pemilu Legislatif 2019 di Kudus, dan menjadi posisi pertama di Jekulo jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya dalam Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Kudus. Dalam Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, tercatat Daftar Pemilih Tetap sekitar 39.554 pemilih laki-laki dan 40.631 pemilih perempuan di Jekulo, artinya ada sekitar 80.185 Pemilih yang harus memilih<sup>3</sup>, namun dalam hasil perhitungan pemilu legislatif di Jekulo pada pemilihan DPR hanya memperoleh 59.680 suara, DPRD I memperoleh 52.112 suara, dan DPRD II 64.933 suara.<sup>4</sup> Ada beberapa alasan mengenai mengapa jumlah Daftar Pemilih Tetap memiliki perbedaan pesat dengan perolehan hasil suara dalam Pemilu. Alasan diantaranya yang mempengaruhi perolehan suara adalah adanya pemilih yang golput atau suara-suara yang tidak sah sehingga perolehan suara benar adanya akan berbeda dengan daftar pemilih. Kesimpulannya adalah strategi partai politik seperti yang digunakan PKB yaitu Strategi Komunikasi, Strategi kaderisasi dan Strategi Sayap Partai pastinya memiliki hambatan dan bagaimana masyarakat Jekulo memilih PKB tentunya bagaimana perilaku pemilih melalui tiga pendekatan yaitu sosiologi, psikologi dan rasional juga mampu mempengaruhi pemilili untuk memilih PKB.

Pemilu secara demokratis dilakukan pada tahun 1999 untuk yang pertama kalinya pasca rezim orde baru. Bentuk kebebasan

---

<sup>3</sup> “Keterangan Bawaslu PHPU 2019” (Jawa Tengah: Bawaslu Jawa Tengah, 2019):17.

<sup>4</sup> Tim Penyunting BPS Kabupaten Kudus, ed., *Kecamatan Jekulo Dalam Angka 2021* (Kudus: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, 2021).

masyarakat Indonesia diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik. Kebebasan tentang pembentukan partai memunculkan 141 partai politik yang terdaftar dalam Departemen Kehakiman, namun hanya 48 partai politik yang dinyatakan memenuhi syarat dalam mengikuti pemilu 1999.<sup>5</sup> Pemilu 1999 menjadi titik awal sejarah Indonesia dalam menjalankan pemilu secara demokratis, dan menjadi bukti absolut hasil pemberontakan rakyat Indonesia kepada pemerintahan Presiden Soeharto. Pemilu yang seharusnya dilaksanakan 2002 setelah lima tahun 1997 dilaksanakan, namun pemilu harus dijalankan pada tahun 1999 setelah terjadi kerisuhan politik berkelanjutan yang berakhir dengan tuntutan dari masyarakat serta dukungan dari para mahasiswa.<sup>6</sup>

Isu mengenai kuatnya Islam di Indonesia dalam susunan kabinet ke VI yang terkesan berpihak pada kalangan muslim, dimana asumsi ini berasal dari diumumkannya susunan kabinet 1993-1998 lima tahun sebelum pelaksanaan pemilu pada tahun 1999. Secara bertahap sistem pemerintahan di Indonesia pro dengan Islam, setelah kabinet V (1988-1993) berlajut kabinet pembangunan VI (1993-1998) keluar mandataris MPR yang pro akan Islam.<sup>7</sup> Karena hal tersebut, segala komoditas politik menggunakan nama Islam sebagai pendukung legitimasi publik dalam skala besar untuk perpolitikan di Indonesia. Sebanyak 48 partai yang ikut dalam pemilu sejak dibukanya kebebasan di Indonesia, terdapat dua puluhan partai Islam yang menunjukkan identitas Islamnya baik secara eksplisit maupun implisit.<sup>8</sup> Seperti kembali pada era pertama kali pemilu pada tahun 1955, dimana adanya ketegangan sosial dalam komunikasi

---

<sup>5</sup> Masyrofah, "Arah Perubahan Sistem Pemilu Dalam Undang-Undang Politik Pasca Reformasi (Usulan Perubahan Sistem Pemilu Dalam Undang-Undang Politik Pasca Reformasi)," *Jurnal Cita Hukum* Vol. 1, No. 2 (2013): 171.

<sup>6</sup> Yunda Pratwi, "Analisis Perolehan Suara Partai Golkar Pada Pemilu 1999 Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Politik* Vol. 1, No. 2 (2012): 2.

<sup>7</sup> Kamsi, "Citra Gerakan Politik Islam Dalam Lintasan Sejarah Perpolitikan Bangsa Indonesia (Studi Era Pra Kemerdekaan Sampai Dengan Era Orde Baru)," *Millah*, Vol. 13, No. 1, (2013): 140.

<sup>8</sup> Asep Saeful Muhtadi, "Dinamika Islam Politik Pasca Orde Baru Perspektif Komunikasi Politik," *Mimba*, Vol. 21, No.2 (2005):222.  
<https://scholar.archive.org/work/ydlnfht6baori3ozfsqdcpr6e/access/wayback/https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/download/174/pdf>.

politik pada ranah ideologi masyarakat di Indonesia yang plural meski jadwal kampanye yang belum dilaksanakan.<sup>9</sup>

Diantara partai politik yang mengatakan Islam pada pemilu tahun 1999, terdapat 13 partai politik Islam dengan asas Islam yang ikut kedalam pemilu diantaranya adalah PK (Partai Keadilan), PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia), PBB (Partai Bulan Bintang), PNU (Partai Nahdlatul Ummah), PUI (Partai Umat Islam), PKU (Partai Kebangkitan Ummat), Partai KAMI (Partai Kebangkitan Muslim Indonesia), PP (Partai Persatuan), PMB (Partai Masyumi Baru), PPIIM (Partai Politik Islam Indonesia Masyumi), PAY (Partai Abdul Yatama), PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia) 1905 dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan). 7 partai politik lainnya menggunakan asas Pancasila namun menggunakan simbol Islam dalam partainya, yaitu PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), PAN (Partai Amanat Nasional), PCD (Partai Cinta Damai), Partai SUNI (Partai Solidaritas Uni Indonesia), PUMI (Partai Umat Muslimin Indonesia), PID (Partai Indonesia Damai) dan PIB (Partai Indonesia Baru).<sup>10</sup>

Pemilu 1999 memperebutkan 462 kursi parlemen, ada sebanyak 172 kursi yang dimenangkan oleh partai politik Islam. Kemenangan partai politik Islam dari 172 kursi, terdapat 87 kursi yang dimenangkan oleh partai politik Islam berasaskan Islam sedangkan sisanya 85 kursi dimenangkan oleh partai politik Islam dengan asas Pancasila. Partai politik dengan simbol Islam namun berasaskan Pancasila tersebut adalah PKB dengan perolehan 51 kursi dan PAN sebanyak 34 kursi.<sup>11</sup> Keikutsertaan PKB dalam Pemilu untuk yang pertama kali mampu menghantarkan Gus Dur atau dengan nama aslinya adalah K.H. Abdurrahman Wahid yang merupakan pendiri PKB menjadi Presiden Republik Indonesia keempat pada Oktober 1999 sampai Juli 2001.<sup>12</sup> Kepemerintahan selanjutnya dipegang oleh Megawati, diangkatnya Megawati sebagai presiden menggantikan Gus Dur menggunakan nama demokrasi

---

<sup>9</sup> Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2009): 91.

<sup>10</sup> Lili Romli, "Partai Islam Dan Pemilihan Islam Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 1, No. 1 (2004): 36.

<sup>11</sup> Kamaruzzaman Bustamam dan Ahmad, "Dinamika Isi-Aivi Politik Di Indonesia Pada Era Reformast (1998-2001)," *Al-Jami'ah*, Vol. 41, No. 1 (2003): 83 <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpm749441a578full.pdf>.

<sup>12</sup> Fajar Novi Eristyawan, "Pelebagaan Partai Kebangkitan Bangsa Studi Kasus Kemerosotan Suara Pada Pemilihan Umum," *Journal.Unair.Ac.Id* (2010), <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpm749441a578full.pdf>.

dengan atas nama rakyat menjadi peluang besar aktor politik menggerus nilai demokrasi karena adanya kuasa politik dalam parlemen. Meskipun Gus Dur hanya menjabat presiden selama dua tahun, realitanya keberhasilan tersebut mampu mengantarkan PKB menjadi partai besar yang cukup disegani oleh partai-partai lainnya yang bahkan sebelumnya telah ada dalam perpolitikan Indonesia.<sup>13</sup>

Demokrasi di Indonesia dalam pemilu 2004 mampu melahirkan 200 partai politik. Namun yang lolos verifikasi pertama atau pengakuan status/pegesahan partai politik sebagai sebuah badan hukum oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM), sesuai dengan UU No.13 Tahun 2002 Tentang Partai Politik hanya 50 partai politik yang lolos. 50 partai politik yang lolos mendapatkan pengakuan dari Departemen Kehakiman dan HAM selanjutnya lanjut mengikuti verifikasi kedua. Tahap penyaringan kedua dari 50 partai mengikuti verifikasi administrasi dengan ikut mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).<sup>14</sup>

Verifikasi kedua diatur dalam UU No.12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, dari 50 partai yang lolos pendaftaran verifikasi administratif ke KPU. UU No.12 Tahun 2003 terkhusus pasal 7 sampai 10, mengatur syarat partai politik ikut pemilu harus memenuhi syarat seperti mengurus minimal 2/3 provinsi di Indonesia, mengurus penuh masyarakat minimal 2/3 Kabupaten atau Kota dalam setiap provinsi memiliki pengurus dengan memiliki kantor dan anggota paling sedikit 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk setiap wilayah yang dikelolanya. Persyaratan tersebut juga secara jelas tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 105 tahun 2003 yang diperbaharui dengan Keputusan KPU Nomor 615 tahun 2003.<sup>15</sup>

Proses verifikasi digunakan untuk pembuktian setiap partai yang telah lolos. Dalam hal ini terdapat dua tahap verifikasi yaitu verifikasi administratif dan verifikasi faktual. Hanya pihak yang lolos verifikasi administratif yang berhak melanjutkan ke tahap penyaringan berikutnya (verifikasi faktual). Verifikasi faktual adalah langkah ketiga dalam proses penyaringan. Pada titik ini yang menjadi

---

<sup>13</sup> Rudi Rohi, "Relasi Kuasa Dalam Demokrasi Indonesia," *Media Komunikasi FPIPS*, No. 23 (2020): 211.

<sup>14</sup> Lili Romli, "Reformasi Partai Politik Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia," *Politica*, Vol. 2, No. 2 (2011): 200.

<sup>15</sup> Asrinaldi, "Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Dan Penguatan Prinsip Tata Kelola Pemilu Yang Berintegritas," in *Call for Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu*, 2019: 2, www. Journal.kpu.go.id.

fokus adalah penentuan apakah dokumen kepengurusan dan kepesertaan sesuai dengan manifes verifikasi administrasi di lapangan. Prosedur verifikasi dituangkan dalam Keputusan KPU No. 1 yang menjabarkan prosedur-prosedur yang disusun dalam putusan KPU No.105 Tahun 2003, yang diperbarui dengan Keputusan KPU No. 615 Tahun 2003. Perlu diketahui terdapat enam partai yang tidak melalui proses verifikasi administratif dan faktual yang sama dengan KPU. Sebab, pada Pemilu 1999, keenam partai itu mencapai Elektoral Threshold (ET) 2% kursi DPR.<sup>16</sup>

Elektoral Treshold (ET) atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan ambang batas pemilihan memiliki fungsi sebagai proses penyerderhanaan partai politik dalam pemilu. Elektoral Treshold (ET) juga digunakan untuk mengawal partai politik baru dengan paham radikal dalam parlemen. Enam partai yang lolos 2% ET adalah Partai Bulan Bintang, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Artinya hanya ada 44 partai yang terlibat dalam prosedur verifikasi, namun hanya ada 18 pihak yang lolos proses verifikasi secara keseluruhan ditambah 6 partai yang lolos 2% ET, total ada 24 partai yang berhak mengikuti pemilu 2004.<sup>17</sup>

Pemilu 2004, PKB mendapatkan perolehan suara sebanyak 10,57% dengan perolehan kursi DPR sebanyak 52 kursi. PKB mengalami penurunan suara yang dikarenakan adanya konflik internal antara kubu Gus Dur dan kubu Matori Abdul Jalil. Konflik tersebut bersumber dari pihak lawan-lawan politik yang ingin melengserkan posisi Gus Dur dari jabatannya sebagai presiden. Hal itu berawal dari adanya sidang istimewa, dimana DPR dari Fraksi PKB diintruksikan untuk tidak hadir. Namun, Matori Abdul Jalil mengambil keputusan untuk hadir yang berujung dengan dipecatnya Matori dari PKB. Konflik berlanjut yang berasal dari ketua umum dan sekretaris jendral DPP PKB, yang saat itu pemegang jabatan tersebut adalah Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf. Keduanya memiliki jabatan juga dalam kabinet Indonesia bersatu yaitu sebagai menteri,

---

<sup>16</sup> Wasisto Raharjo Jati, "Menuju Sistem Pemilu Dengan Ambang Batas Parlemen Yang Afirmatif," *Jurnal Yudisial*, Vol. 6, No. 2 (2013): 155, <http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/110>.

<sup>17</sup> Firman Freaddy Busroh, "Reformulasi Penerapan Electoral Threshold Dalam Sistem Kepertaian Di Indonesia," *Lex Librum* Vol. 3, No. 2 (2017): 522.

yang berakhir dengan pemecatan keduanya dari jabatan ketua umum dan sekretaris jendral DPP PKB.<sup>18</sup>

Pemilu yang selanjutnya pada tahun 2009 ada paling tidak 132 partai politik yang mendaftar dalam pemilu. Selanjutnya dari 132 partai politik yang mendaftar, hanya 22 partai politik yang lolos dalam verifikasi. 22 partai politik tersebut detambahkan kedalam 7 partai yang telah lolos 3% ET dan 9 partai politik yang telah mendapatkan kursi DPR. Sehingga dalam pemilu 2009 terdapat 38 partai politik yang ikut dalam tingkat nasional dan 6 partai politik lokal dari Nanggorae Aceh Darussalam (NAD). Pemilu 2009, PKB mengalami penurunan yang signifikan, PKB hanya mendapatkan suara sebesar 4,94% dan 21 kursi dalam parlemen.<sup>19</sup>

Menurunnya suara PKB disebabkan konflik berkepanjangan akibat pemecatan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Majelis Tahfidz dan Lukman Edi sebagai Sekertaris Jendral. Keduanya merasa tidak bisa menerima dan meminta agar Gus Dur mengembalikan jabatan dengan alasan melanggar hukum. Perpecahan kedua kubu di lingkungan PKB menyebabkan Kongres Luar Biasa Parung mengangkat Gus Dur sebagai Ketua Umum Majelis Syuro, Ali Masykur Musa sebagai ketua umum dewan tahfidz serta jabatan sekretaris jendral dipegang oleh Yenny Wahid. Hal itu berlanjut hingga PKB kubu Muhaimin Iskandar menggelar konferensi luar biasa di Hotel Mercure Ancol. Pada akhirnya kongres tersebut memperoleh keputusan bahwa Ketua Umum Dewan Tahfidz dijabat oleh Muhaimin Iskandr, K.H. Aziz Mansur sebagai Dewan Syuro dan jabatan Sekertaris Jendral dipegang oleh Lukman Edi.<sup>20</sup>

Pada tanggal 18 Juli 2008 kasasi PKB terkait konflik PKB ditolak oleh Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung memutuskan dalam kesetrukturan PKB kembali pada hasil muktamar 2005 yang tetapkan di Semarang yag mana Muhaimin Iskandar tetap menjadi ketua umum dan Lukman Edi adalah sekretaris jendral. Peleburan atas konflik yang terjadi hingga menghasilkan penurunan suara menjadi pembelajaran dalam PKB. Pemilu 2014 PKB mampu mengembalikan eksistensinya kembali, dalam Pemilu 2014 PKB

---

<sup>18</sup> Lili Romli, "Koalisi Dan Konflik Internal Partai Politik Pada Era Reformasi," *Politica* Vol. 8, No. 2 (2017): 103.

<sup>19</sup> Jayanti Puspitaningrum, "Tinjauan Teoretis Sistem Pemilu (Memotret Sistem Pemilu 2009)," *Konstitusi*, Vol. 2, No. 1 (2009): 31.

<sup>20</sup> Sitaesmi N.R.P Puteri, "Penurunan Suara PKB Dalam Pemilu Legislatif 2009 Di Kabupaten Jombang Dan Upaya-Upaya Mengatasinya," *Politik Muda* Vol. 3, No. 3 (2014): 438.

mampu memperoleh suara sebanyak 9,04% dan kursi parlemen sebanyak 47 kursi.<sup>21</sup>

Cara partai politik dalam melebarkan sayapnya dengan mengunsurkan kegiatan politik dengan Islam tidak memiliki pengaruh signifikan dalam perolehan suara dalam pemilu. Buktinya adalah dari pemilu sejak dimualinya rezim reformasi pada tahun 1999, tidak ada partai politik manapun yang mampu terus bertahan menjadi pemenang melainkan siapa yang diusung dalam pemilihan presiden maupun pileg.<sup>22</sup> Sesuai dengan realita yang terjadi dengan PKB, partai tersebut masih mampu bertahan dengan ikon utama PKB yaitu sosok guru besar Gus Dur yang menjadi kekhasan dari partai tersebut. Dari kepemimpinan Gus Dur di PKB hingga kalahnya beliau dari kasasi yang berakhir dengan tersingkirnya Gus Dur dari PKB dan meninggalnya beliau. Namun foto, pemikiran dan cita-cita dari sosok Gus Dur masih mampu menjadi warna khas dari PKB sehingga sampai saat ini PKB masih mampu mempertahankan eksistensinya dan cukup disegani oleh partai-partai lainnya.<sup>23</sup>

Penjelasan bagaimana partai politik yang terbentuk dengan partai politik yang ikut serta dalam pemilu tidaklah sama, hal tersebut karena atas segala pertimbangan yang ada. Jika dilihat dari keberadaannya, partai barulah yang belum mampu menempati posisi keikutsertaan. Hal tersebut dikarenakan atas pertimbangan seperti infrastruktur yang belum memadai, terjadinya konflik internal, elit-elit partai politik belum menjadi aturan main partai (AD/ART) sebagai satu-satunya pion utama dalam mengelola partai dan yang terakhir adalah belum adanya jiwa demokrasi berpartai dari para elit-elit politik. Partai politik yang dibutuhkan dalam pemilihan umum adalah partai yang dapat berfungsi sebagai institusi demokrasi yang kuat dan efektif. Dalam konteks ini, partai politik harus dapat berfungsi sebagai tempat untuk mengembangkan dan merekrut individu-individu politik yang dapat menciptakan kohesi internal, sehingga dapat membentuk partai politik yang kuat dan tangguh.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Muhammad Ridoi, *“Kekuatan Figur Dalam Partai Politik (Studi Terhadap Abdurrahman Wahid Di Partai Kebangkitan Bangsa)”* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016): 7.

<sup>22</sup> Imam Ropii, “Peranan Dan Dukungan Organisasi Sayap Terhadap Partai Politik,” *Jurnal Konstitusi Unidha* (2020): 13.

<sup>23</sup> Supriyadi, “Peran Politik Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),” *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008): 2

<sup>24</sup> Artis, “Eksistensi Partai Politik Dan Pemilu Langsung Dalam Konteks Demokrasi Di Indonesia,” *Jurnal Sosial Budaya* 9, no. 1 (2012): 70.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terbentuk atas usulan para Nahdliyin kepada PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) yang menginginkan adanya wadah untuk para warga NU dalam menyalurkan aspirasi politik, sehingga terbentuklah PKB yang dideklarasikan pada 23 Juli 1998. Kuatnya kekrabatan dalam lingkungan NU menjadi ciri utama dalam sistem pengorganisasian terhadap kegiatan pendidikan pesantren dan lembaga sosial lainnya. Hal tersebutlah yang membuat kaum Nahdliyin untuk turun ke dalam bidang politik, karena mereka beranggapan PKB telah memiliki sistem kekerabatan yang kuat sehingga mampu membentuk partai politik sebagai payung masyarakat terkhusus para Nahdliyin ke dalam badan legislasi Indonesia. PKB yang lahir dari rahim NU mampu menjadikan PKB menjadi partai politik dengan basis Islam yang disegani oleh partai lain karena masa NU yang cukup besar di Indonesia.<sup>25</sup>

Partai politik dalam pemilu memiliki peran penting, yaitu sebagai tempat seleksi keterwakilan rakyat Indonesia sebagai pemimpin nasional maupun daerah. Kontribusi partai politik mampu mendukung sistem politik di Indonesia terlebih dalam kemajemukan masyarakat Indonesia. Partai politik memiliki peran penting dalam mengaspirasikan suara rakyat tentunya hal ini juga mampu meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia<sup>26</sup>. Asas PKB sendiri bukan berkedudukan pada Islam, melainkan pancasila. PKB memiliki ideologi yang terbuka, bukan hanya memfokuskan pada NU saja melainkan non NU pun mampu masuk kedalam PKB. Islam sendiri adalah agama yang bertauhid dan berakhlak, dengan menggunakan pendekatan yang berasaskan pancasila menjadikan PKB yang menjunjung politik berakhlak dengan pendekatan kultur budaya yang majemuk sesuai dengan Negara Indonesia. Hal itulah mengapa PKB hanya menjadikan Islam sebagai simbol dan pancasila sebagai asas politiknya.<sup>27</sup>

Pentingnya peran partai politik pada pemilu dalam jalannya pemerintahan Indonesia, menjadikan partai politik sebagai wadah rakyat Indonesia untuk mengaspirasikan suaranya. Dalam Islam,

---

<sup>25</sup> Tsaniyatul Azizah, "Kuasa Kiai Dalam Pemaknaan Politik Partai Kebangkitan Bangsa Di Daerah Istimewa Yogyakarta," *IN Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 1, no. 2 (2012): 402

<sup>26</sup> Artis, "Eksistensi Partai Politik Dan Pemilu Langsung Dalam Konteks Demokrasi Di Indonesia.," *Jurnal Sosial Budaya*, 9, No. 1 (2012): 60

<sup>27</sup> Azizah, "Kuasa Kiai Dalam Pemaknaan Politik Partai Kebangkitan Bangsa Di Daerah Istimewa Yogyakarta.," *IN Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 1, no. 2, (2012): 404.

partai politik tidak dikenal dalam mengatur negara. Urusan negara untuk ranah Islam menggunakan sistem musyawarah, penunjukan dan bai'at terhadap seseorang terkhusus dalam penunjukan pemimpin daerah atau suatu negara.<sup>28</sup> Sistem tersebut mungkin saja terjadi dalam awal kepemerintahan Islam sejalan dengan minimnya komunitas muslim saat itu. Maka peran partai politik dalam jalannya pemerintahan saat ini terlebih di Indonesia yang plural menjadi kepentingan tersendiri untuk beberapa kelompok yang ada di Indonesia.

Pemilu tahun 2019 adalah pemilu pertama di Indonesia yang dilaksanakan secara serentak dengan putaran pemilu sekaligus, yaitu Pemilu DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan Umum Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden di laksanakan pada tanggal 17 April 2019, sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-11/2013 Tentang Pemilu Serentak. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan pendanaan negara, meminimalkan biaya Politik yang tinggi bagi peserta Pemilu, serta birokrasi terkait dan pemotongan program kerja pemerintah.<sup>29</sup>

Dalam konteks strategi politik, PKB mengusung tiga strategi yaitu strategi komunikasi, strategi kaderisasi, dan strategi sayap partai. Dari ketiga strategi yang digunakan nyatanya memiliki hambatan seperti halnya di Jekulo sendiri dari PKB memang cukup dekat dengan masyarakat namun nyatanya kedekatan kader biasanya terhadap lelaki dikarenakan adanya rapat reses, perempuan kurang memiliki kesempatan dalam mengetahui politik. Selanjutnya ada strategi kaderisasi dimana calon yang diangkat memanglah memiliki reputasi baik dimata masyarakat, karena hal tersebut PKB memiliki pandangan tersendiri bagi masyarakat awam terhadap perekrutan yang kurang terbuka. Strategi terakhir adalah sayap partai, sayap partai tentunya mampu menjadi wadah bagi masyarakat namun di Jekulo sendiri jalannya sayap kurang berjalan baik dimana memiliki kekurangan sumber daya manusianya karena beberapa alasan. Lalu bagaimanakah PKB masih mampu memperoleh suara tertinggi di

---

<sup>28</sup> Hasanuddin Yusuf Adan, "Partai Politik Dalam Perspektif Islam," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 3, no. 1 (2014): 495, <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

<sup>29</sup> Apolonaris Gai and Frans Bapa Tokan, "Analisa Dampak Penyelenggaraan Pemilu Serentak Dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi Di Indonesia: Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Kupang-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019," *Warta Governare: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2020): 109.

Jekulo. Jawabannya ada pada perilaku pemilih melalui pendekatan sosiologi, psikologi dan rasional.

Salah satu strategi partai politik yang telah diatur dalam perundang-undangan adalah strategi pengkaderan. Strategi mempertahankan eksistensi partai politik diatur dalam Pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Hak Partai Politik untuk Mendirikan dan Mengorganisasikan Organisasi Partai Politik. Pembentukan organisasi partai politik dibedakan menjadi dua cara, yaitu organisasi partai politik yang didirikan langsung oleh partai politik dan organisasi partai politik yang tidak didirikan langsung oleh partai politik.<sup>30</sup> Sejalan dengan penjelasan tersebut, Ketua Umum PKB juga mengatakan, bahwa kemenangan PKB dalam pemilu 2019 didukung oleh adanya organisasi sayap partai politik. Salah satu organisasi sayap partai politik PKB adalah Garda Bangsa. Dewan Koordinasi Nasional Garda Bangsa bersedia mengembangkan potensi generasi milenial sebagai gambaran untuk pembangunan Indonesia yang semakin maju.<sup>31</sup> Selain spekulasi dalam pemilu 2019, PKB sendiri terbentuk oleh ajuan dari umat Islam dengan aliran NU dengan keinginan bahwa PKB mampu menjadi wadah aspirasi umat Nahdliyin dalam ranah politik. Maka dapat dikatakan bahwa eksistensi PKB masih menjadi unggulan untuk kaum Nahdliyin dan masih menjadi partai politik yang disegani oleh partai lain.

Keinginan dari suatu masyarakat dalam membentuk organisasi tertentu, seperti halnya masyarakat NU yang memiliki keinginan membentuk PKB yang akan dijadikan kendaraan masyarakat NU untuk ikut andil dalam membangun negara dalam sistem pemerintahan Indonesia. Menurut Smelser<sup>32</sup>, penyebab adanya keinginan yang menimbulkan sikap kolektif untuk membentuk suatu gerakan memiliki beberapa sebab. Penyebab pertama adalah *Structural conduciviness*, merupakan keadaan yang mampu menjadi pendorong untuk memunculkan gerakan. Munculnya gerakan tersebut tergambarkan dalam situasi negara pada tahun 1998,

---

<sup>30</sup> Septi Nur Wijayanti and Kelik Iswandi, "Peran Organisasi Sayap Partai Politik Dalam Kaderisasi Partai Politik Di Indonesia," *Sasi* 27, no. 4 (2021): 477.

<sup>31</sup> Eko Prasetya, "Cak Imin Yakin Organisasi Sayap Partai Dongkrak Suara PKB dalam Pemilu 2019", Merdeka.com, 8 Februari, 2023, <https://m.merdeka.com/politik/cak-imin-yakin-organisasi-sayap-partai-dongkrak-suara-pkb-di-2019.html>

<sup>32</sup> Mohammad Arif and Yuli Darwati, "Eksistensi Agama Dalam Politik PKB Di Kabupaten Nganjuk," *Realita : Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam* 20, no. 1 (2022): 36.

situasi tersebut ditimbulkan oleh adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Selanjutnya yaitu *Structuralist strain*, merupakan ketegangan struktural yang muncul dan mendorong munculnya suatu gerakan. PKB mendapatkan tantangan dalam memperoleh simpatik masyarakatnya yaitu dengan adanya partai politik yang muncul dari kalangan NU. Namun PKB masih menjadi partai politik besar karena ikon dari PKB yaitu Gus Dur atau K. H. Abdurrahman Wahid yang juga merupakan penggerak berdirinya PKB. Ketiga, *Growth and Spread of general belief* (penyebaran keyakinan umum), memunculkan keyakinan umum. Sebuah keyakinan para pendukung PKB adalah adanya pelaksanaan politik yang baik merupakan ibadah, hal tersebut merupakan salah satu keyakinan umum sehingga mampu memunculkan kepercayaan masyarakat terhadap PKB.

Pada rapat pleno yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menentukan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus pada Pemilu tahun 2019 periode 2019-2024, bertempat di Hotel Gripta. Dalam rapat pleno tersebut, diambil jumlah kursi yang diperoleh masing-masing peserta pemilu Kabupaten Kudus tahun 2019 sesuai berita acara No. 21/PL.01.9.BA//3319/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Kudus Pemilihan Umum 2019 menghasilkan 45 kursi. Dari 45 kursi, PDI-Perjuangan meraih kursi terbanyak yaitu sebesar 8 kursi, selanjutnya posisi kedua adalah PKB dan Partai Golkar dengan perolehan kursi yang sama yaitu sebanyak 7 kursi, Partai Gerindra menempati posisi ke empat dengan perolehan 6 kursi, dan posisi 5 dan 6 yaitu partai NasDem dan PKS yang memiliki jumlah kursi yang sama yaitu 4 kursi.<sup>33</sup>

Kabupaten Kudus memiliki 4 dapil dalam pemilu legislatif pemilihan DPRD Kabupaten Kudus 2019, dapil satu berasal dari Kecamatan Jati dan Kecamatan Kota. Dari 6 partai pendulang kursi terbanyak diatas, PDI-P mendulang suara terbanyak yaitu sebesar 26,8%. Dapil satu mendapatkan 3 kursi dari 8 kursi yang diperoleh oleh PDI-P secara keseluruhan. Disusul PKB yang mendapatkan

---

<sup>33</sup> Tim Humas Bawaslu Kudus, "Hasil Pleno: PDIP Raih Kursi Terbanyak Untuk DPRD Kabupaten Kudus", Bawaslu Kabupaten Kudus, 1 Maret 2023 <https://kudus.bawaslu.go.id/berita/hasil-pleno-pdip-raih-kursi-terbanyak-untuk-dprd-kabupaten-kudus>

suara sebanyak 14,8% dengan perolehan kursi sebanyak 1 kursi. Selanjutnya adalah Partai Gerindra dengan perolehan suara 12,8% dan 1 kursi. PKS mendapatkan mendapatkan suara 8,5% dengan 1 kursi. Partai Golkar memperoleh suara 6,3% dengan perolehan 1 kursi, selanjutnya adalah Nasdem dengan 5,4% dan 1 kursi.

Dapil 2 berasal dari Kecamatan Kaliwungu dan Gebog, perolehan suara terbanyak diperoleh dari PDI-P dengan 19,3% dan 2 kursi. Selajutnya adalah Partai Golkar dengan perolehan suara sebanyak 13,9% dan 2 kursi, selanjutnya adalah PKB dengan suara sebanyak 13,8% dan 2 kursi. Partai Gerindra di dapil 2 mendulang 1 kursi dengan perolehan suara sebanyak 11,5%, Partai Nasdem memiliki 1 kursi dengan suara 6,8% dan PKS memiliki 1 kursi dengan suara 5,3%.

Dapil 3 berasal dari Kecamatan Dawe dan Jekulo dengan suara terbanyak dimenangkan oleh Partai PKB yaitu sebanyak 20,8% dan memperoleh 3 kursi, disusul oleh Partai Golkar dengan 13,8% suara dan 2 kursi, Gerindra 12,4% suara dan 2 kursi, Nasdem 9,2% suara 1 kursi, PDIP 8,6% suara dan 1 kursi, serta PKS 8,1% suara dengan 1 kursi. Dapil 4 berasal dari Kecamatan Mejobo, Undaan dan Bae dengan perolehan suara terbanyak sebesar 19,6% dari partai Gerindra dengan memperoleh 2 kursi, Partai Golkar 14,8% dan 2 kursi, PDI-P 14,2% suara dan 2 kursi, PKB 11,6% suara dan 1 kursi, Nasdem 6% suara dan 1 kursi serta PKS 5,4% suara dan 1 kursi.<sup>34</sup> Berdasarkan data tersebut, perolehan suara PKB terbanyak berasal dari dapil 3 yaitu Kecamatan Dawe dan Kecamatan Jekulo sebanyak 20,8% suara . Dalam penelitian ini akan memfokuskan perolehan suara berasal dari partai PKB di Kecamatan Jekulo, hal tersebut disebabkan oleh perolehan suara terbanyak dari kemenangan PKB di dapil 3 berasal dari Kecamatan Jekulo yaitu 14,1% suara sedangkan Kecamatan Dawe hanya sebesar 6,6% suara.

Perolehan suara partai politik dalam pemilu dapat dipengaruhi oleh perilaku pemilih. Dalam pemilu, tentunya terdapat pemilih yang konsisten dalam memilih partai politik adapula yang tidak konsisten dalam memilih. Lalu bagaimana dengan perolehan suara PKB di Kecamatan Jekulo pada pemilu 2019 di Kudus yang mana suara PKB memiliki suara terbanyak saat itu. Bagaimana eksistensi PKB saat itu sehingga mampu mendulang suara terbanyak

---

<sup>34</sup> Dian Utoro Aji, "Ini 45 Anggota DPRD Kudus Terpilih Periode 2019-2024", Muria News, 1 Maret, 2023, <https://www.murianews.com/amp/2019/08/10/170361/ini-45-anggota-dprd-kudus-terpilih-periode-2019-2024>

di Kecamatan Jekulo. Apakah adanya kepercayaan tokoh sehingga memungkinkan dua kalinya Drs. H. Ilwani duduk di kursi DPRD Kabupaten Kudus. Atau adanya rasa simpati kesamaan Islam, dimana mayoritas masyarakatnya beragama Islam ataupun banyaknya bantuan PKB dalam bentuk sebuah aturan yang membantu ataupun materil pembangunan. selanjutnya adalah Jekulo kebanyakan pondok pesantren dan PKB lahir dari kaki Islam, akankah alasan tersebut mampu mendulang simpati masyarakat terhadap PKB sehingga PKB di Jekulo mampu memenangkan Pemilu 2019 di Kudus.

Partai politik merupakan penghubung antara pemerintah dan masyarakat, yang artinya partai politik adalah pilar demokrasi. Dalam hal ini kemenangan suara partai politik dalam pemilu tentunya sangat dipengaruhi oleh perilaku pemilih, yang artinya partai politik mampu maju dan mendapatkan posisi dalam pemerintahan jika memiliki perolehan suara terbanyak dalam pemilu. Maka artinya bagaimana eksistensi partai politik mampu mempengaruhi pola pikir pemilih sehingga mampu mendapatkan kepercayaan penuh dari pemilih itu sendiri. seperti yang telah dijelaskan bahwa partai PKB adalah partai yang berdiri dibawah atap Islam, bagaimana Partai Kebangkitan Bangsa mampu memperoleh suara dalam pemilu terkhusus di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dalam pemilu legislatif 2019. Dari uraian diatas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Strategi Partai Kebangkitan Bangsa Dalam Memperoleh Suara Dalam Pemilu Legislatif 2019 Di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini berusaha membahas tentang bagaimana strategi PKB di Jekulo dan perilaku pemilih dalam mempengaruhi suara dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Kudus khususnya di Kecamatan Jekulo.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Strategi Partai Kebangkitan Bangsa dalam memperoleh suara di Kecamatan Jekulo pada Pemilu Legislatif 2019 ?
2. Bagaimana perilaku pemilih dalam mempengaruhi eksistensi Partai Kebangkitan Bangsa di Kecamatan Jekulo pada Pemilu Legislatif 2019 ?

**D. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendekatan melalui strategi PKB dalam memperoleh suara di Kecamatan Jekulo dalam Pemilu 2019.
2. Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tentang bagaimana perilaku pemilih di Kecamatan Jekulo dalam Pemilu 2019.

**E. Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan bagi pembaca baik secara akademis maupun praktis bagi pembacanya :

1. Manfaat Akademis
  - a. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap arah pandangan dan pemikiran baru kepada pembaca mengenai bagaimana Partai PKB mampu memperoleh suara terbanyak pada saat Pemilu 2019 di Jekulo.
  - b. Dari hasil penulisan penelitian ini bukan hanya dapat digunakan sebagai bahan, namun juga diharapkan dapat menjadi rujukan yang mampu dikembangkan lagi ke penelitian selanjutnya.
  - c. Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan diskusi yang dapat dikembangkan kembali. Sehingga dari penelitian ini bukan berhenti pada kajian saja melainkan dapat menjadi langkah untuk memulai perubahan serta pergerakan mengarah kepada kemajuan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Dalam penulisan penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan alternatif untuk pemecahan suatu masalah mengenai bagaimana partai PKB mampu mempengaruhi masyarakat Jekulo atau perolehan suara Pemilu Legislatif 2019 di Jekulo dipengaruhi oleh perilaku masyarakat Jekulo.
  - b. Dalam penulisan penelitian ini memiliki harapan dapat menjadikan rekonstruksi dan juga bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan mengenai perilaku partisipasi masyarakat Jekulo atau eksistensi dari partai PKB di Jekulo sebagai pendukung perolehan suara pada Pemilu Legislatif 2019 di Jekulo.

## F. Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun :

### 1. Bagian Awal

Untuk bagian pertama dalam penulisan penelitian yang terdiri atas yaitu Sampul Luar, Sampul Dalam, Lembar Pengesahan Proposal, Pernyataan Keaslian Skripsi, Abstrak, Moto, Persembahan, Pedoman Tentang Arab Latin, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel.

### 2. Bagian Isi

Selanjutnya di tahapan isi. Di dalam isi memiliki lima bab, dan diantara bagian bab satu dengan bab selanjutnya saling berkesinambungan dan berkaitan dan semakin pada bab selanjutnya maka penjelasannya semakin menjurus kepada pokok inti masalah dalam penelitian. Kelima bab tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : Pendahuluan**

Bab pertama adalah bab pendahuluan yang mana pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang atau alasan dan masalah dalam suatu kasus yang di teliti oleh peneliti. Dalam bab ini memiliki bagian yaitu yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan yang terakhir adalah sistematika dalam penulisan.

#### **BAB II : Landasan Teori**

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang menunjang dilakukannya penelitian ini yang meliputi teori yang berkaitan dengan partai politik terkhusus dengan Partai Kebangkitan Bangsa, pemilu di Indonesia dan perilaku pemilih. Bahasan lain dari kajian teori sendiri mengenai hasil penelitian terdahulu yang terdiri dari kajian yang penjelasannya adalah suatu permasalahan yang tengah diteliti bisa berada dari jurnal, artikel, maupun studi library yang kaitannya masih mengenai masalah yang diteliti atau bisa disebut dengan literatur review dan bagian selanjutnya adalah kerangka berpikir.

#### **BAB III : Metode Penelitian**

Bab ketiga adalah bagian peneliti menguraikan metode penelitian, jenis dan

pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan dan menulis data penelitian. Bagian ini juga mencakup penjelasan tentang setting penelitian, yaitu kapan dan dimana penelitian ini dilakukan. Selanjutnya, ada penjelasan tentang sumber data utama dalam penelitian ini. Bab ini juga menjelaskan tentang sumber data, teknik pengumpulan data, verifikasi keabsahan data, serta teknik analisis data.

#### **BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab ini berisikan gambaran umum Partai Kebangkitan Bangsa dalam Pemilu 2019 di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dan analisis mengenai Eksistensi Partai Kebangkitan Bangsa di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dalam Pemilu Legislatif 2019.

#### **BAB V : Penutup**

Lalu yang terakhir adalah bab penutup. Bab penutup memiliki bagian mengenai kesimpulan mengenai pembahasan pada penelitian lalu selanjutnya adalah dengan memberikan kritik dan saran sebagai kelanjutan dari penyelesaian masalah yang telah diteliti oleh penulis penelitian.

3. Bagian yang terakhir adalah bagian memaparkan mengenai daftar pustaka. Mengenai daftar pustaka sendiri memuat tentang sumber-sumber yang terkait dengan peneliti, daftar pustaka sendiri bisa didapat melalui sumber-sumber seperti buku dan lainnya yang masih sangkutannya dengan masalah peneliti. Selanjutnya adalah dokumen-dokumen yang bisa menjadi bukti dalam penelitian tersebut.